

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara, dimana dengan penerimaan pajak ini pemerintah dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan bagi kepentingan bersama.. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak merupakan suatu kewajiban warga negara yang berupa iuran wajib terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak (Wasrini, 2020).

Penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam menyusun anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat, saat ini sekitar 70% APBN di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak. (Nindi, 2018). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak tahun 2001 Dirjen Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*Tax Administration Reform*) yang menjadi landasan

terciptanya administrasi perpajakan yang modern dan dipercaya oleh masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas, menyangkut modernisasi sistem administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Nindi, 2018).

Konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan sistem yang diberikan kepada WP (wajib pajak) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi (Arifah et al., 2017). Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan potensi kepatuhan penerimaan pajak yang tersedia yang memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi, kemajuan teknologi diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-registration*, dan *e-system* seperti, *e-SPT*, *e-Billing*, dan, *e-filing*. Dengan diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pada masyarakat wajib pajak sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak maka hal ini berdampak pula pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan

jumlah penerimaan APBN dan dapat menstabilkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Pada tahun 2012 - 2022 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan juga masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, terbatasnya sosialisasi pemahaman wajib pajak, dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. (Septiyani dan Amanita, 2023 : 8)

Permasalahan yang sering muncul dan terjadi adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan pelaku wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, bukan hanya sekedar membayar pajak dalam nominal besar atau tertib melaporkan pajaknya melalui SPT.

Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Pradipta (2020).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Maka dari itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dalam segi variabel independen dan objek penelitian yang berbeda. Peneliti pertama Nindi Trisna Putri pada Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2018) menguji tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo. Peneliti kedua Hamdelah (2018) menguji tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung). Peneliti ketiga Sri Ena Wasrini (2019) menguji tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Maka dengan itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada segi variabel independen dan segi objek penelitian. Peneliti sekarang meneliti tentang Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan klien dari perusahaan yang di kerjakan oleh Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan sangatlah penting dalam mendukung program

pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya. Sehingga dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan yang modern dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak, maka diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi berdampak pula pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memberi judul :
“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, maka dalam penelitian ini penulis memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. di Kantor Konsultan Pajak Prisca Arum Limantoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak baik dalam skala individu maupun perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka, serta menjadi panduan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan memberikan gambaran tentang bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari perspektif instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sistem administrasi perpajakan yang sedang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan di masa depan.